



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: 1
Rapat Ke-	: 19
Jenis Rapat	: Rapat Panja RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 18 September 2023
Waktu	: Pukul 13.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Perubahan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 19 (sembilan belas) Anggota Panja Komisi II DPR RI dari 25 (dua puluh lima) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI C. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI D. Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI E. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI F. Sekretaris Jenderal dan Tata Ruang/Kepala BPN RI G. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI H. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara I. Pimpinan DPD RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Panja RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Komisi II DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI, Sekretaris Jenderal dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pimpinan DPD RI, dengan agenda melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Perubahan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), hari Senin, 18 September 2023, dibuka pukul 14.39 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Panja RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Komisi II DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI, Sekretaris Jenderal dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pimpinan DPD RI, dengan agenda melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Perubahan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), sebagai berikut:

- Terdapat **4 (empat) Isu Pokok Perubahan DIM** dalam RUU IKN yang belum disepakati, yaitu:
 1. Cluster No. 2 Pertanahan
 2. Cluster No. 3 Pengelolaan Keuangan
 3. Cluster No. 7 Tata Ruang
 4. Cluster No. 9 Jaminan Keberlanjutan

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat Panja RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Komisi II DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI, Sekretaris Jenderal dan Tata Ruang/Kepala BPN RI,

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pimpinan DPD RI, dengan agenda melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Perubahan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), sebagai berikut:

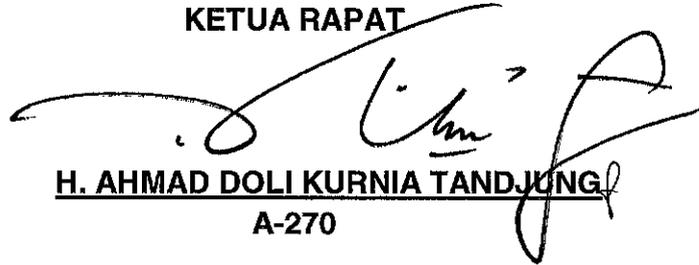
Setelah mendengar penjelasan Menteri PPN/Kepala Bappenas, maka pokok Pembahasan RUU IKN terkait DIM untuk Cluster No. 2 Pertanahan, Cluster No. 3 Pengelolaan Keuangan, Cluster No. 7 Tata Ruang dan Cluster No.9 Jaminan Keberlanjutan disepakati secara bersama DIM terkait oleh Panja RUU IKN.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 20.24 WIB.

Jakarta, 18 September 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270